

---

---

# PENILAIAN KESIAPAN UKM PRODUSEN MI BASAH DALAM MENERAPKAN SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 2987 : 2015

(Studi Kasus: CV. ABC)

*Assessment of SMEs Wet Noodle Producers Readiness on the Implementation of Indonesian National Standard (SNI) 2987:2015 Certification*

(Case Study: CV. ABC)

Danar Agus Susanto<sup>1,2</sup>, Mokhamad Suef<sup>1</sup>, Putu Dana Karningsih<sup>1</sup> dan Bambang Prasetya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

<sup>2</sup>Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Badan Standardisasi Nasional (BSN), Gedung 430 Lantai 2, Komplek Puspiptek, Muncul, Kec. Setu, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia  
e-mail: danar.206010@mhs.its.ac.id

Diterima: 22 Februari 2021 , Direvisi: 2 Juni 2021 , Disetujui: 30 November 2021

## Abstrak

Produk mi basah merupakan salah satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Besarnya pangsa pasar produk ini, memberikan persaingan usaha antar produsen semakin sengit, sehingga memerlukan tindakan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produknya. Khusus untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), persaingan ini lebih terasa karena terbatasnya akses keuangan dan teknologi, biaya produksi tidak efisien, terbatasnya keterampilan manajemen, penjualan, dan bahan baku. Peningkatan daya saing produk dapat dilakukan dengan penerapan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 2987: 2015. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan UKM produsen mie basah (CV. ABC) dalam sertifikasi SNI. Metode penilaian kesiapan UKM CV. ABC dalam menerapkan SNI 2987:2015 terbagi atas empat tahapan, yaitu merancang alat ukur (kuesioner), penilaian dengan kuesioner, identifikasi variabel kritis dan penyusunan usulan program untuk mengeliminir variabel kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan CV. ABC dalam sertifikasi SNI adalah sebesar 67,67%. Variabel teknis menjadi variabel kritis dalam sertifikasi SNI sehingga diperlukan rekomendasi atau usulan program kebijakan berupa pendampingan sertifikasi.

**Kata kunci:** Usaha Kecil Menengah (UKM), mi basah, sertifikasi, Standar Nasional Indonesia (SNI).

## Abstract

*Wet noodle products are one of the foods that are widely consumed by people in Indonesia. The large market share of this product has made business competition between producers increasingly fierce, thus requiring business actors to take action to increase the competitiveness of their products. Especially for Small and Medium Enterprises (SMEs), this competition is more pronounced due to limited access to finance and technology, inefficient production costs, limited management skills, sales, and raw materials. Increasing product competitiveness can be done by applying and certifying the Indonesian National Standard (SNI) 2987:2015. The purpose of this study to determine the readiness of the wet noodle producer SMEs (CV. ABC) in SNI certification. The method of assessing the readiness of SMEs CV. ABC in applying SNI 2987: 2015 is divided into four stages, namely designing a measuring instrument (questionnaire), assessing using a questionnaire, identifying critical variables and preparing a program proposal to eliminate critical variables. The research result shows that the readiness of CV. ABC in SNI certification is 67.67%. Technical variables become critical variables in SNI certification so that a recommendation or policy program proposal is needed in the form of certification assistance.*

**Keywords:** Small and Medium Enterprises (SMEs), wet noodles, certification, Indonesian National Standard (SNI)

## 1. PENDAHULUAN

Mi basah merupakan produk pangan yang dibuat dari bahan baku utama tepung terigu dengan atau tanpa penam bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diijinkan, yang diperoleh melalui proses pencampuran, pengadukan, pencetakan lembaran (*sheeting*), pembuatan untaian (*slitting*), pemotongan (*cutting*) berbentuk khas mi dengan atau tanpa mengalami proses pemasakan (perebusan atau

pengukusan) (Badan Standardisasi Nasional, 2015). Konsumsi mi di Indonesia pada tahun 2018 menempati urutan kedua di dunia setelah Cina dengan konsumsi 12,54 miliar bungkus (Sukamto et al., 2019), dan diproyeksikan semakin meningkat tiap tahun (Firmansyah & Hidayatullah, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik (2020), konsumsi mi goreng dan mi rebus di Indonesia mencapai 2,488 porsi per bulan perkapita penduduk Indonesia (tidak termasuk mi instan). Jumlah penduduk Indonesia

pada tahun 2019 adalah sebanyak 268,7 juta, maka konsumsi mi rebus dan goreng per bulan adalah 667,03 juta porsi per bulan atau 22,23 juta porsi perhari. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Indonesia untuk konsumsi mi rebus dan mi goreng sebesar Rp. 23.520 per bulan, atau sebesar 6.319 Milyar per bulan secara nasional (Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan hal ini, kebutuhan dan pasar mi rebus dan mi goreng di Indonesia sangat besar.

Produsen mi di Indonesia terdiri dari berbagai jenis dan skala perusahaan, yang meliputi industri besar sampai dengan usaha kecil menengah (UKM). Pangsa pasar dan nilai ekonomi yang besar menjadikan usaha pada kategori mi memiliki persaingan yang ketat. Khusus bagi UKM, persaingan ini merupakan tantangan dan keniscayaan yang harus dihadapi. Hambatan yang dihadapi UKM dalam persaingan antara lain hambatan persaingan; akses keuangan; harga energi; teknologi; biaya produksi tidak efisien; faktor-faktor ekonomi; keterampilan manajemen; proses; keterbatasan penjualan; dan bahan baku (Iriyanti & Azis, 2012). Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan daya saing produk UKM sangat rendah sehingga tidak mampu berkompetisi dengan produk pesaing, khususnya dengan perusahaan besar (Fahma et al., 2019).

Peningkatan daya saing dapat dilakukan melalui penerapan standar. Penerapan standar memberikan manfaat ekonomi yang nyata dalam bentuk nyata berupa nilai keuangan (*tangible*) maupun tidak nyata (*intangible*) seperti membantu berkompetisi dengan perusahaan yang lebih besar, membantu dalam akses pasar ekspor, membantu memberikan praktek bisnis terbaik dan membantu operasi perusahaan menjadi lebih efisien dan berkembang (Susanto et al., 2017). Penerapan suatu standar sangat berhubungan dengan aspek kualitas, yaitu sebagai jaminan atas keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Parameter kualitas terkait mi basah diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 2987 tahun 2015. Standar ini mengatur tentang istilah dan definisi, komposisi, syarat mutu, pengambilan contoh dan cara uji mi basah mentah dan mi basah matang. Syarat mutu atau parameter kualitas yang diatur dalam SNI ini meliputi keadaan (bau, rasa, warna dan tekstur), kadar air, kadar protein, kadar abu tidak larut dalam asam, bahan berbahaya (formalin, asamborat), cemaran logam (timbal, kadmium, timah, merkuri), cemaran arsen, cemaran mikroba (angka lempeng total, *Escherichia coli*,

*Salmonella sp.*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus cereus*, kapang) dan deoksinivalenol. Pemenuhan terhadap penerapan SNI, dibuktikan melalui kegiatan penilaian kesesuaian, yaitu pengujian dan sertifikasi. Setelah melalui proses ini maka perusahaan mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) atau label tanda SNI. Label SNI menjadi tanda bahwa suatu produk telah sesuai dengan persyaratan SNI.

CV. ABC merupakan UKM yang memproduksi mi basah yang berlokasi di Jawa Tengah. Dalam usaha peningkatan daya saing produk dan bersaing dengan kompetitor, CV. ABC bermaksud akan melakukan sertifikasi SNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan CV. ABC dalam menerapkan SNI 2987:2015.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014).

Penerapan SNI pada dasarnya adalah bersifat sukarela, namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib (Sukananda, 2018). Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. SNI 2987:2015 terkait mi basah merupakan SNI dengan pemberlakuan bersifat sukarela. Berdasarkan hal ini, tidak ada kewajiban bagi industri yang memproduksi mi basah untuk menerapkan SNI 2987:2015. Namun bagi yang menerapkannya akan memperoleh nilai tambah (*value added*) dan daya saing lebih dalam perdagangan serta

# Penilaian Kesiapan UKM Produsen Mi Basah dalam Menerapkan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 2987 : 2015 (Studi Kasus: Cv. Abc)

(Danar Agus Susanto, Mokhammad Suef, Putu Dana Karningsih dan Bambang Prasetya)

memberikan jaminan dan kepercayaan kepada konsumen atas kualitas produk yang dihasilkan.

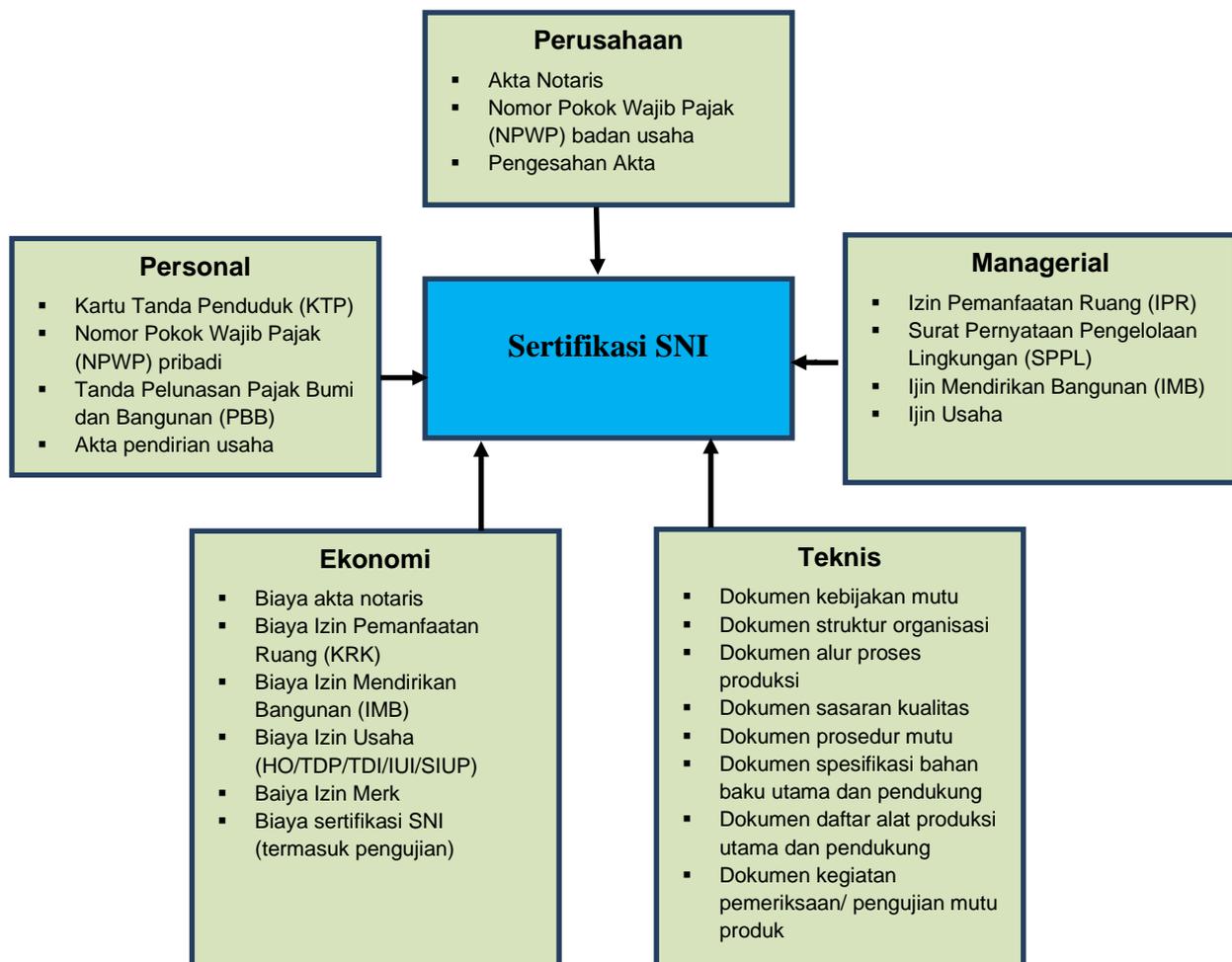
## 2.2 Lembaga Sertifikasi Produk Mi Basah

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014). Sedangkan Lembaga Sertifikasi iProduk (LSPro) adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. LSPro yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan mempunyai ruang lingkup mi basah adalah Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi Institut Pertanian Bogor (JPJKS

IPB) dengan nomor registrasi LSPR-030-IDN. Sampai dengan tahun 2020 JPJKS IPB merupakan satu-satunya LSPro terakreditasi KAN di Indonesia yang mempunyai ruang lingkup produk mi basah.

## 2.3 Framework Penilaian Kesiapan Sertifikasi

*Framework* penilaian kesiapan sertifikasi menggunakan metode pendekatan dari aspek personal, perusahaan, manajerial, teknis dan ekonomi (Fahma et al., 2018). Masing-masing aspek variabel tersebut memiliki pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail terkait kebutuhan dokumen pendukung. Variabel dan kebutuhan dokumen pendukung dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan dari Lembaga Sertifikasi Produk.



Gambar 1 Kerangka kerja (framework) kesiapan sertifikasi SNI (Fahma et al., 2018).

## 3. METODE PENELITIAN

Penilaian kesiapan UKM CV. ABC dalam menerapkan SNI 2987:2015 terbagi atas empat tahapan. Tahap pertama adalah merancang alat ukur (kuesioner) yang digunakan untuk

melakukan penilaian kesiapan UKM CV. ABC dalam menerapkan SNI 2987:2015. Tahap kedua melakukan penilaian menggunakan kuesioner yang telah dibuat untuk menilai kesiapan CV. ABC dalam menerapkan SNI. Tahapan ketiga adalah mengidentifikasi tahapan proses/variabel kritis. Sedangkan tahap keempat adalah membuat usulan program untuk mengeliminir variabel kritis sehingga dapat mempercepat CV. ABC dalam memperoleh sertifikasi SNI.

### 3.1 Merancang alat ukur (kuesioner)

Variabel kuesioner menggunakan framework yang dikembangkan oleh Fahma et al. (2018). Selanjutnya variabel tersebut diterjemahkan dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan variabel dan kebutuhan dokumen pendukung seperti pada Gambar 1.

### 3.2 Penilaian kesiapan CV. ABC

Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner pada Tabel 1. Tingkat kesiapan sertifikasi SNI diukur dengan menghitung jumlah atribut yang UMKM dapat dipenuhi relatif terhadap jumlah atribut secara keseluruhan dalam suatu variabel dan nilainya dinyatakan sebagai prosentase. Penilaian kesiapan didasarkan pada tingkat pemenuhan persyaratan (personal, perusahaan, managerial, teknis dan ekonomi) dan keminatan UMKM melakukan sertifikasi SNI.

### 3.3 Identifikasi variabel kritis

Variabel kritis adalah variabel dimana persyaratannya sulit dipenuhi oleh UMKM. Pada Tabel 1 Desain kuesioner dan penilaian kesiapan penerapan SNI.

kuesioner ditunjukkan dengan nilai prosentase terkecil dan atribut yang tidak dapat dipenuhi oleh UKM.

### 3.4 Desain rekomendasi usulan program dan kebijakan

Rekomendasi atau usulan kebijakan digunakan untuk menutup kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi diharapkan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar memainkan peranan yang penting bagi manufaktur dan industri untuk mendistribusikan produk secara global, sehingga standar harus bersifat terbuka dan merupakan hasil kesepakatan dari para stakeholder secara konsensus. Dalam mendukung peranan standar dalam perdagangan, maka pengembangan standar harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan secara internasional.

### 4.1 Desain kuesioner dan penilaian kesiapan sertifikasi SNI

Desain kuesioner dikembangkan dari framework kesiapan sertifikasi SNI dari (Fahma et al., 2018) dengan ditambahkan persyaratan dari Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi Institut Pertanian Bogor (JPJKS IPB). Kuesioner ini digunakan sebagai alat untuk menilai kesiapan CV, ABC dalam proses sertifikasi SNI. Desain kuesioner dan penilaian kesiapan sertifikasi SNI disajikan pada Tabel 1.

Variabel	Pertanyaan	Jawaban		Persentase
		Sudah	Belum	
Personal	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	✓		100%
	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi	✓		
	Tanda Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	✓		
	Akta pendirian usaha	✓		
Perusahaan	Akta Notaris	✓		100%
	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha	✓		
	Akta Legalitas	✓		
Managerial	Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)	✓		100%
	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	✓		
	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	✓		
	Ijin Usaha			
	- Izin Gangguan (HO)	✓		
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)				
	- Tanda Daftar Industri (TDI)			

**Penilaian Kesiapan UKM Produsen Mi Basah dalam Menerapkan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 2987 : 2015 (Studi Kasus: Cv. Abc)**

(Danar Agus Susanto, Mokhamad Suef, Putu Dana Karningsih dan Bambang Prasetya)

Variabel	Pertanyaan	Jawaban		Persentase
		Sudah	Belum	
Teknis	- Izin Usaha Industri (IUI)	✓		26,67%
	- Surat Izin Usaha Industri (SIUP)	✓		
	Sertifikat Merk / Pendaftaran Merk dari Ditjen HAKI*	✓		
	Dokumen kebijakan mutu	✓		
	Dokumen struktur organisasi	✓		
	Dokumen alur proses produksi	✓		
	Dokumen sasaran kualitas	✓		
	Dokumen prosedur mutu		✓	
	Dokumen spesifikasi bahan baku utama dan pendukung		✓	
	Dokumen daftar alat produksi utama dan pendukung		✓	
	Dokumen kegiatan pemeriksaan/ pengujian mutu produk		✓	
	Surat Penunjukkan Wakil Manajemen*		✓	
	Biodata Wakil Manajemen*		✓	
	Daftar Induk Dokumen Sistem Manajemen Mutu*		✓	
	Ekonomi	Ilustrasi pembubuhan tanda SNI dan kode lembaga LSPro LJKS-IPB pada kemasan produk*		
Sertifikat kalibrasi peralatan pengujian*			✓	
Sertifikat Hasil Uji Percobaan Produk (sesuai dengan parameter dalam SNI 2987:2015*			✓	
Kelengkapan minimal peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu produk :Mesin pengaduk, alat pengepres, alat pemotong, alat pengukur berat, alat pengujian kadar air.			✓	
Biaya akta notaris		✓		
Biaya Izin Pemanfaatan Ruang (KRK)		✓		
Ekonomi	Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	✓		100%
	Biaya Izin Usaha (HO/TDP/TDI/IUI/SIUP)	✓		
	Baiya Izin Merk	✓		
	Biaya sertifikasi SNI (termasuk pengujian)	✓		
<b>Total</b>				<b>66,67%</b>

\*dokumen tambahan yang diminta sebagai persyaratan oleh Lembaga Sertifikasi Produk

Berdasarkan Tabel 1, variabel personal, perusahaan, manajerial dan ekonomi mendapatkan nilai kesiapan sebesar 100% yang menandakan bahwa CV. ABC memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi aspek legalitas usahanya. Aspek legalitas berpengaruh secara simultan terhadap kinerja dan kesuksesan suatu UKM (Ratnawati & Hikmah, 2013). Legalitas menjadi informasi kepada konsumen terkait keberadaan suatu usaha dan harus sesuai dengan pemberi legalitas, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam lain-lain (Widyamurti, 2018). Legalitas usaha merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam sebuah usaha, yang menentukan sebuah usaha akan diakui dan terdaftar secara resmi di pemerintah. Legalitas

usaha menjadi penting dalam proses pengembangan dan pemantapan sebuah usaha, seperti melakukan pinjaman ke bank, mengurus merek, sertifikasi produk (Susantiningrum, 2018).

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah Dokumen Lingkungan Hidup (DLH) berupa surat yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rosdiana, 2018). izin ini wajib dimiliki oleh orang perorangan atau badan yang akan melaksanakan pembangunan bangunan dalam rangka memberi kepastian hukum mengenai lokasi yang akan dilakukan

pembangunan sebelum mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB). Seperti pada Tabel 1, CV ABC sudah memiliki IPR dan juga IMB yang menandakan bahwa UKM ini sudah memiliki legalitas dari aspek lokasi usaha. CV ABC juga sudah memiliki ijin usaha berupa SIUP dan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Selain itu CV ABC juga sudah mendaftarkan merk di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Merk yang sudah terdaftar secara resmi menjadikan kegiatan operasional usaha dapat berlangsung sesuai ketentuan yang ada dan bermanfaat untuk penerimaan hasil produksi sehingga produknya lebih dikenal pasaran secara lebih luas (Kurniawati et al., 2018).

Variabel ekonomi berhubungan dengan kesiapan UKM secara keuangan dalam sertifikasi SNI. Nilai 100% menandakan bahwa UKM berkomitmen secara penuh secara keuangan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan biaya sertifikasi. Modal dari UKM merupakan aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat penjualan (Maheswara et al., 2016). Apabila modal yang dimiliki UKM cukup, kemudian didukung oleh komitmen yang tinggi untuk melakukan sertifikasi SNI, maka aspek ekonomi (keuangan) tidak akan menjadi masalah yang berarti.

Variabel teknis, merupakan satu-satunya variabel yang belum dapat dipenuhi 100% oleh UKM. Variabel ini menyangkut persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan harus dipenuhi oleh UKM sebelum mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi SNI. Tingkat persentase yang rendah dapat dikarenakan kurangnya informasi terkait sertifikasi SNI yang diperoleh UKM. Salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk menerapkan, tidak menerapkan atau menunda menerapkan standar SNI adalah tingkat pemahaman materi kebijakan SNI (Haryotejo, 2013). Terdapat 11 aspek yang belum dipenuhi oleh UKM dalam menerapkan SNI yang terdiri dari 4 bagian yang termasuk dalam manajemen manual mutu dan 7 aspek syarat dari LSPro. Dokumen pendukung manajemen manual mutu yang meliputi prosedur mutu, spesifikasi bahan baku, daftar alat produksi dan pemeriksaan atau pengujian mutu produk bekum ada sama sekali di UKM. Surat penunjukan wakil manajemen, biodata wakil manajemen, daftar induk manual mutu, ilustrasi pembubuhan tanda SNI juga belum dilakukan oleh UKM. Sedangkan aspek sertifikat kalibrasi pengujian, yang ada baru sertifikat kalibrasi untuk timbangan. Aspek

kelengkapan minimal peralatan produksi yang belum dipenuhi adalah ketersediaan alat pengujian kadar air. Sedangkan sertifikat hasil uji produk sesuai dengan parameter dalam SNI 2987:2015 terdapat dua parameter yang belum dapat dipenuhi yaitu parameter parameter kadar abu tidak larut dalam asam dan angka lempeng total. Pengujian dilakukan di laboratorium yang terakreditasi KAN yaitu Balai Besar Industri Agro (BBIA). Hasil pengujian kadar abu dalam asam adalah sebesar 0,08%, sedangkan persyaratan dalam SNI adalah maksimal 0,05%. Hasil pengujian parameter angka lempeng total sebesar  $9,6 \times 10^7$  Koloni/g, sedangkan persyaratan SNI adalah  $1 \times 10^6$  Koloni/g.

#### 4.2 Penentuan variabel kritis

Berdasarkan pada Tabel 1, variabel kritis adalah variabel teknis dengan nilai persentase 26,67%. Pada variabel ini terdapat 11 aspek yang belum dapat dipenuhi oleh UKM, yaitu:

- a. Dokumen prosedur mutu
- b. Dokumen spesifikasi bahan baku utama dan pendukung
- c. Dokumen daftar alat produksi utama dan pendukung
- d. Dokumen kegiatan pemeriksaan/ pengujian mutu produk
- e. Surat Penunjukkan Wakil Manajemen
- f. Biodata Wakil Manajemen
- g. Daftar Induk Dokumen Sistem Manajemen Mutu
- h. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI dan kode lembaga LSPro LJKS-IPB pada kemasan produk
- i. Sertifikat kalibrasi peralatan pengujian
- j. Sertifikat Hasil Uji Percobaan Produk
- k. Kelengkapan minimal peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu produk: Mesin pengaduk, alat pengepres, alat pemotong, alat pengukur berat, alat pengujian kadar air.

Agar proses sertifikasi SNI berlangsung dengan lancar maka dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pemilik UKM untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Komitmen dari pemilik UKM merupakan salah satu faktor yang penting dan berpengaruh dalam penerapan SNI (Susanto et al., 2016). Variabel kritis ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap sumber informasi terkait analisis pasar, perkembangan teknologi dan persaingan global (Hermanto et al., 2016).

#### 4.3 Desain rekomendasi usulan program dan kebijakan

# Penilaian Kesiapan UKM Produsen Mi Basah dalam Menerapkan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 2987 : 2015 (Studi Kasus: Cv. Abc)

(Danar Agus Susanto, Mokhamad Suef, Putu Dana Karningsih dan Bambang Prasetya)

Desain rekomendasi usulan program dan kebijakan mengacu pada hasil penelitian dari (Fahma et al., 2019). Penentuan rekomendasi dan kebijakan disusun menjadi empat kelompok besar seperti disajikan pada Tabel 2. Pengaturan

rekomendasi berdasarkan nilai kesiapan pemenuhan seluruh persyaratan dan juga tingkat keminatan untuk melakukan sertifikasi SNI.

Tabel 2 Rekomendasi program dan kebijakan.

No	Kondisi	Rekomendasi
1.	Pemenuhan keseluruhan persyaratan > 50% Berminat melakukan sertifikasi produk	Pendampingan Sertifikasi
2.	Pemenuhan keseluruhan persyaratan < 50% Berminat melakukan sertifikasi produk	Pendampingan dan Pelatihan
3.	Pemenuhan keseluruhan persyaratan > 50% Tidak berminat melakukan sertifikasi produk	Sosialisasi dan Motivasi bagi Pemilik UKM
4.	Pemenuhan keseluruhan persyaratan < 50% Tidak berminat melakukan sertifikasi produk	Sosialisasi dan pelatihan

Sumber: (Fahma et al., 2019)

Tingkat kesiapan sertifikasi SNI dari CV ABC sebagai pemenuhan keseluruhan persyaratan adalah sebesar 66,67%, sedangkan UKM ini memiliki keminatan terhadap sertifikasi SNI, maka rekomendasi yang diusulkan adalah rekomendasi nomor 1 yaitu pendampingan sertifikasi. Pendampingan sertifikasi dapat dilakukan oleh siapapun, baik pemerintah daerah melalui dinas terkait, maupun pemerintah pusat melalui Kementerian maupun Lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan UKM di Indonesia. Pendampingan UKM dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan pentingnya dan manfaat sertifikasi SNI, desain dan cara produksi yang baik dan pengelolaan administrasi penunjang usaha (Fauziyah et al., 2020). Program pendampingan penerapan standar dapat dilakukan pada UKM untuk menjaga kualitas produk (Ismanto et al., 2020). Pendampingan sertifikasi SNI kepada UKM harus dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari bagian administrasi, produksi pembuatan produk, manajemen keuangan hingga pemasaran dengan melibatkan pihak-pihak terkait (Sari et al., 2019). Bantuan pemerintah dalam bentuk pendampingan atau pembinaan kepada UKM tidak serta menjamin UKM akan sukses, namun terdapat faktor-faktor yang lain seperti nilai penjualan yang meningkat, komitmen UKM, inovasi, dan permintaan konsumen akan produk yang berkualitas (Susanto et al., 2016).

## 5. KESIMPULAN

Kesiapan CV ABC dalam sertifikasi SNI adalah sebesar 67,67%. Variabel personal, perusahaan, managerial dan ekonomi mendapatkan nilai

kesiapan sebesar 100%, sedangkan variabel teknis mendapatkan nilai 26,67%. Variabel teknis menjadi variabel kritis dalam sertifikasi SNI sehingga diperlukan rekomendasi atau usulan program kebijakan berupa pendampingan sertifikasi. Pendampingan sertifikasi dapat berupa penyuluhan penyusunan dokumen-dokumen dan kelengkapan administrasi sesuai dalam variabel teknis yang merupakan persyaratan untuk pendaftaran sertifikasi SNI ke Lembaga Sertifikasi Produk. Pendampingan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah maupun melalui bekerjasama dengan pihak swasta.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Departemen Teknik Sistem dan Industri - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang telah mendukung penelitian ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang telah memberikan dukungan beasiswa *degree by research*. Ucapan terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada pemilik UKM CV. ABC produsen mi basah dan seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2020). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia*. BPS RI. <https://www.bps.go.id/publication/2020/06/29/ca7beb0dabf3dc5f2f314260/pengeluaran->

- untuk-konsumsi-penduduk-indonesia--september-2019.html
- Badan Standardisasi Nasional. (2015). *SNI 2987:2015*. <http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailSNI/9370>
- Fahma, F., Zakaria, R., & Gumilang, R. F. (2018). Framework for Designing the Assessment Models of Readiness SMEs to Adopt Indonesian National Standard (SNI), Case Study: SMEs Batik in Surakarta. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 319(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/319/1/012078>
- Fahma, F., Zakariya, R., & Gumilang, R. F. (2019). Penilaian Kesiapan Ukm Batik Dalam Sertifikasi Sni (Studi Kasus : Ukm Batik Di Surakarta). *Jurnal Standardisasi*, 21(1), 9. <https://doi.org/10.31153/js.v21i1.732>
- Fauziyah, E., Hidayati, D. R., & Sunyigono, A. K. (2020). Pendampingan UKM Permata Samudra dalam Pengelolaan Usaha Pembuatan Produk Ikan Asin. *Jurnal Abdimas Mahakam*, 4(1), 164. <https://doi.org/10.24903/jam.v4i1.811>
- Firmansyah, L. M., & Hidayatullah, T. (2020). *Prospek bagus mi instan asal Indonesia*. Lokadata. <https://lokadata.id/artikel/prospek-bagus-mi-instan-asal-indonesia>
- Haryotejo, B. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi produsen mie instan dalam penerapan standar nasional indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 7(1), 111–127.
- Hermanto, A., Tayibnapis, A. Z., & Setyaningrum, I. (2016). Strategi Pengembangan Ukm Berbasis Inovasi di Provinsi Jawa Timur: Periode 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 93. <https://doi.org/10.24123/jeb.v20i2.1599>
- Irjayanti, M., & Azis, A. M. (2012). Barrier Factors and Potential Solutions for Indonesian SMEs. *Procedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 3–12. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00315-2](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00315-2)
- Ismanto, H., Tamrin, M. H., & Edward, M. Y. (2020). Pendampingan UKM Tenun Ikat Troso dalam Pengelolaan Model Pemasaran Berbasis Online. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v11i1.2744>
- Kurniawati, E., Santoso, A., & Widowati, S. Y. (2018). Penyuluhan Arti Pentingnya Merk Dagang. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 2(1), 66–70. <https://doi.org/10.31764/jmm.v2i1.1350>
- Maheswara, A. A. N. G., Setiawina, N. D., & Saskara, I. A. N. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Ukm Sektor Perdagangan Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(12), 4271–4298.
- Ratnawati, A. T., & Hikmah. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja UKM (Studi Kasus UKM Di Kabupaten dan Kota Semarang). *Serat Acitya*, 2(1), 102. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/41/38>
- Rosdiana, Y. (2018). Analisis Yuridis Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 81–95. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3149/2869>
- Sari, Y. P., Farida, I., & Hetika, H. (2019). Model Pendampingan Umkm Pengolahan Hasil Laut Dengan Metode Pendekatan Pendampingan Terintegrasi. *Monex : Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(1), 293. <https://doi.org/10.30591/monex.v8i1.1269>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang (UU) No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*.
- Sukamto, S., Azizah, R., Suprihana, S., & Karim, F. (2019). Produksi Mie Protein Tinggi dari Terigu yang Difortifikasi Tepung Komposit dan Protein Kacang Hijau. *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2019*, 487–495. <http://www.conference.unsri.ac.id/index.php/lahansuboptimal/article/view/1576/952>
- Sukananda, S. (2018). Diversi Jurnal Hukum. *Diversi Jurnal Hukum*, 4(2), 150–179. <https://doi.org/10.32503>
- widya. (2018). Pemetaan Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dan Alternatif Solusinya. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran (SNPAP) 2018*, 229–234. <https://jurnal.uns.ac.id/snpap/article/view/27958/21810>
- Susanto, D. A., Isharyadi, F., & Aliyah, N. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi UKM

**Penilaian Kesiapan UKM Produsen Mi Basah dalam Menerapkan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 2987 : 2015 (Studi Kasus: Cv. Abc)**

(Danar Agus Susanto, Mokhammad Suef, Putu Dana Karningsih dan Bambang Prasetya)

---

- Dalam Menerapkan Standar Secara Konsisten. *Jurnal Standardisasi*, 17(2). 19i1.411
- Susanto, D. A., Isharyadi, F., & Ritonga, M. (2017). Manfaat Ekonomi Penerapan Standar Pada Usaha Kecil Menengah Menggunakan ISO Methodology. *Jurnal Standardisasi*, 19(1), 25–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31153/js.v>
- Widyamurti, N. (2018). Standing Pouch Berbahan Paper Metal Di Era Ekonomi. *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, 1(1), 1–9. <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/kewirausahaan/article/view/45/27>